

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang keberlanjutan suatu organisasi. Setiap organisasi pasti diperhadapkan dengan masalah pengelolaan keuangan, termasuk organisasi gereja. Gereja termasuk organisasi sektor publik yang tidak bertujuan mencari keuntungan atau disebut organisasi nirlaba. Sebagai organisasi nirlaba, gereja berkewajiban dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang diperuntukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada jemaatnya, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, komitmen, kualitas sumber daya manusia, dan perangkat pendukung merupakan faktor penentu terlaksananya pelaporan yang dibutuhkan dan pelatihan bagi pengelola keuangan gereja merupakan bagian dari faktor-faktor tersebut. Hal ini disebabkan karena terkait dengan tata kelola keuangan, maka gereja bisa terpecah pecah karena kurang tepat dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak positif bagi pertumbuhan jemaat dan juga mempersiapkan landasan yang kokoh bagi generasi penerus.

Pemahaman terhadap manajemen keuangan gereja yang kurang seringkali mengakibatkan perbedaan pendapat didalam gereja itu sendiri yang disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar yang

dibutuhkan. Sekalipun gereja merupakan organisasi religious, namun pemahaman yang rendah tentang akuntabilitas masih sangat rendah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi penyelewengan keuangan gereja. Laporan pertanggungjawaban keuangan gereja harus memiliki standart baku sehingga mempermudah dalam melakukan pemeriksaan. Sebagai organisasi nirlaba, gereja memiliki karakteristik dan sifat berbeda dengan organisasi bisnis karena berbagai aktifitas yang dilakukan bersumber dari mereka sendiri.

Gereja merupakan badan publik karena memperoleh dana dari publik (umat/jemaat), sehingga Gereja berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dana. Permasalahan pertanggungjawaban dana gereja juga sering terjadi, contoh di gereja ini penerimaan dana khusus yang dikumpulkan jemaat untuk tujuan khusus hanya dilaporkan jumlah pemasukannya, namun dalam penggunaan tidak dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada jemaat. Selain itu terdapat juga penerimaan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gereja yang hanya disampaikan secara lisan kepada jemaat jumlah bantuan tersebut sementara laporan penggunaan dana bantuan tersebut tidak dilaporkan secara tertulis, sementara gereja tersebut belum selesai pembangunannya seratus persen namun jumlah bantuan dana yang diberikan sudah tidak mencukupi untuk melanjutkan pembangunan sehingga pembangunan gerejapun diberhentikan. Masalah yang sering terjadi juga yaitu pemasukan dana dalam bentuk persembahan yang tidak dilaporkan sehingga ada jemaat yang harus mengkomplain kepada pengelola keuangan gereja baru dilaporkan.

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, Gereja harus merencanakan dengan baik sumber pendapatan maupun belanja yang akan dikeluarkan untuk membiayai aktivitas pelayanannya. Menurut Walz dalam Munthe (2019) ada beberapa hal penting dalam perencanaan keuangan gereja. (1) Sifat anggaran. Setiap departemen atau komisi memerlukan anggaran pendapatan belanja seperti sekolah minggu, pemuda, kelompok laki-laki dan perempuan dan lainnya. Demikian juga dengan anggaran khusus seperti pembangunan gedung gereja memerlukan anggaran yang terpisah. Anggaran biasanya terpisah satu tahun. (2) Mempersiapkan anggaran, bendahara perlu mempersiapkan anggaran sesuai keputusan dengan keputusan persidangan. Bila anggaran yang diusulkan melebihi anggaran sebelumnya disepakati sidang jemaat majelis perlu melakukan percakapan bersama (3) Menggunakan anggaran, berkaitan dengan pemanfaatan anggaran secara efektif untuk berbagai program pelayanannya yang telah disepakati dalam persidangan jemaat. (4) pembelian yang terkendali, artinya pembelian/ pembelanjaan harus diawasi agar sesuai dengan keputusan persidangan jemaat. (5) Penyesuaian anggaran. Dalam setiap organisasi, selalu ditemui adanya biaya tak terduga. Bila hal ini terjadi pimpinan jemaat dapat melakukan kebijakan selama tidak mengganggu program lainnya.

Dalam mempertanggungjawabkan dana, gereja mengacu pada tata gereja di klasifikasi. Pada kenyataannya tata gereja tidak ditampilkan bentuk pertanggungjawaban dana yang harus dibuat, namun sesuai dengan data yang diperoleh di kantor sinode bagian keuangan, sebenarnya bentuk pertanggungjawaban dana yang sudah ada pelaksanaannya di gereja-gereja kota kupang

belum maksimal sehingga pelaporan pertanggungjawaban dana Gereja di klasis dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kemauan gereja masing-masing. Oleh karena itu komitmen, kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung dan motivasi merupakan beberapa faktor yang menentukan kemampuan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Gereja di klasis yang tepat bagi gereja untuk manajemen kegiatan termasuk mengelola keuangannya. Salah satu organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah, ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan sistem akuntansi sehingga berimplikasi pada ketidakhandalan dan ketidaktepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan yang menurut Halim, dkk (2010) meliputi: pimpinan SKPD sering tidak memahami secara utuh tentang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, kapasitas SDM yang terbatas, komitmen yang tidak memadai, penguasaan tentang peraturan keuangan dan akuntansi yang rendah, keterbatasan fasilitas kerja yang terbatas atau perangkat pendukung (komputer) dan prasarana tugas serta belum berjalannya koordinasi antara unit-unit yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan

Beberapa peneliti terdahulu mengenai Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Gereja yaitu Kalangi (2013) dalam jurnalnya “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Gereja di klasis (GMIT) Kota kupang, Helki I. Lombok (2015) dalam jurnal “Penerapan Akuntansi Nirlaba Terhadap Laporan Keuangan Di Gereja klasis (GMIT) dari beberapa referensi tersebut menunjukkan hasil yang sama bahwa penerapan akuntansi pada gereja belum

sesuai pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Motivasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban dana GMT. Meskipun para pengelola keuangan gereja memiliki motivasi kerja yang baik, hal tersebut tidak berpengaruh atau memberikan pengaruh yang kecil terhadap pelaksanaan pelaporan pertanggung-jawaban dana gereja. Hal ini disebabkan karena para pengelola keuangan gereja melaksanakan pelaporan pertanggungjawabannya sesuai dengan keinginan masing-masing gereja tanpa memahami peraturan yang dikeluarkan oleh BPMS, selain itu kurangnya perhatian dari BPMS untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban dana gereja yang baik.

Sedangkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azhar (2007) tentang Faktor-Faktor keberhasilan penerapan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada pemerintah Kota Kupang menyimpulkan bahwa secara Komitmen, SDM dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan Penerapan permendagri 13 Tahun 2006.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“FAKTOR- FAKTOR PELAKSANAAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA GEREJA ” DI KLASIS KOTA KUPANG”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya seperti diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang kinerja organisasi sektor publik dalam hal ini Gereja Klasis yang ada di Kota Kupang

dalam kemampuan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Gereja dengan judul **Faktor-Faktor Pelaksanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Gereja Di Klasis Kota Kupang.**

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: Apa Saja Faktor-Faktor Pelaksanaan Pelaporan Dana Gereja di Klasis Kota Kupang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan pelaporan dana gereja di Klasis Kota Kupang.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi lembaga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan faktor-faktor pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban dana gereja

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan tingkat faktor-faktor pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban dana gereja di Klasis Kota Kupang